

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada awalnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan *stakeholder*. Namun dengan seiring berkembangnya zaman perusahaan dituntut untuk menjalankan bisnisnya berlandaskan pada konsep 3P yaitu *Profit* (Keuntungan), *People* (masyarakat) dan *Planet* (lingkungan) yang disebut juga bisnis berkelanjutan hal ini dapat disajikan dalam laporan yang disebut *sustainability report*. *Sustainability report* memenuhi informasi yang dibutuhkan *stakeholder* pada saat terjadinya krisis. *Sustainability report* dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi dampak aktivitasnya.

Pengungkapan *Sustainability report* di Indonesia masih bersifat sukarela yaitu belum ada peraturan yang mewajibkan. Laporan ini disusun sesuai pedoman GRI yang berlokasi di Belanda dan pemegang otoritas lain di dunia, berusaha mengembangkan “*Framework for Sustainability Reporting*” dan versi terakhir yaitu G4 *guidelines*. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitasnya yang disajikan dalam Laporan Tahunan. Sedangkan untuk *Sustainability Report* berbeda dengan *CSR* yaitu dilaporkan secara terpisah dari Laporan Tahunan yang bersifat sukarela.

Di Indonesia masih sedikit perusahaan publik yang menerbitkan *sustainability report* hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta *ISRA* yang terdaftar pada web *National Center For Sustainability Reporting* pada tahun 2016 hanya terdapat 55 perusahaan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sebanyak 514 perusahaan. Hal ini terjadi karena belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan listing untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Walaupun belum ada peraturan yang mewajibkan tetapi terus terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sadar bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi juga

aspek sosial dan lingkungan. Peningkatan tersebut dapat dilihat bahwa pada awalnya tahun 2005 hanya terdapat 1 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* kemudian sampai pada tahun 2016 telah terdapat 120 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, berdasarkan informasi dari situs *National Center For Sustainability Reporting* baik yang listing maupun yang tidak listing di BEI, kenaikan jumlah perusahaan tersebut dapat dilihat peserta Indonesia *Sustainability Reporting* atau *ISRA* pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Fenomena *Sustainability Report*



Sumber : Situs NCSR

Kemudian berdasarkan informasi dari pers Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 bahwa walaupun pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela, namun sudah terdapat hampir 9% perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Penerbitan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam *Global Reporting Index (GRI)*. Sampai dengan akhir tahun 2016, dapat dilihat bahwa sebanyak 49 perusahaan listing BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan.

Menurut Sarwano, berdasarkan pernyataan-nya pada acara *ISRA* atau *Indonesia Sustainability Reporting Award* pada akhir Desember 2016 menyatakan bahwa kita harus mengikuti contoh Bursa Efek Singapura, yang mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Karena dengan melalui pelaporan keberlanjutan, investor dapat memutuskan apakah aman atau tidak untuk berinvestasi dalam perusahaan dalam hal risiko

lingkungan dan sosial. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menerbitkan *sustainability report*.

Antusiasime yang cukup tinggi dari penerbitan laporan keberlanjutan para *stakeholder* juga menuntut perusahaan untuk tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut merupakan laporan yang penting untuk diterbitkan terutama dalam hal untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Kemudian untuk perusahaan yang belum membuat tidak sebandingnya jumlah perusahaan di Indonesia yang membuat *sustainability report* dengan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia untuk membuat *sustainability report*. Meskipun pengungkapan *sustainability report* tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*Good Corporate Governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Utama, 2006) dalam (Nasir et al. 2013). Jadi fenomena pada penelitian ini yaitu belum adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkap *Sustainability Report*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *sustainability report* yaitu menurut FCGI *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Adapun struktur *Good Corporate Governance* yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi serta Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan dibantu oleh beberapa komite salah satunya Komite Audit.

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, menurut Shamil et al (2014) bahwa semakin besar jumlah dewan direksi maka semakin efektif dalam pengungkapan informasi termasuk *sustainability report*.

Komite Audit juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *sustainability report*, untuk menuju pengungkapan informasi yang lebih baik, selain menerbitkan laporan keuangan yang berintegritas, pihak manajemen mengungkapkan informasi dalam laporan tambahan, yaitu pengungkapan *sustainability report* (Sari dan Marsono, 2013). Besarnya komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* karena semakin besar komite audit, pengawasan yang dilakukan akan semakin maksimal (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012) dalam (Risty dan Sany, 2015).

Kepemilikan Institusional adalah Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain (Zia Golda, 2016). Perusahaan memiliki saham oleh institusi yang lebih besar cenderung memberikan dukungan pada perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan melakukan pengungkapan *sustainability report*. Kemudian menurut Sudarno (2013) menyatakan bahwa rata-rata untuk perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* diperoleh rata-rata persentasi kepemilikan saham institusi sebesar 49,8769% sedangkan kepemilikan saham institusi pada perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* diperoleh rata-rata sebesar 39,6519%. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* memiliki kepemilikan saham institusi yang lebih besar.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Suryono dan Prastiwi, 2011) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan menanggung *monitoring cost* yang juga tinggi. Perusahaan dalam mempublikasikan *sustainability report* memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari annual report yaitu *sustainability report* (Sari dan Marsono, 2013)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *sustainability report* yaitu, sebagai berikut :

Nazari et al. (2015) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *sustainability report*, sedangkan Pratama dan Yulianto (2015) dengan penelitiannya bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *sustainability report*. Hal ini mencerminkan kepemilikan institusional di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*.

Komite Audit berdasarkan penelitian Rafifah dan Ratmono (2016) hasil penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report* sedangkan berdasarkan penelitian Risty & Sany (2015) bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report*. Hal ini terjadi karena banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum memahami peran utamanya. Sehingga manajemen yang diawasi langsung oleh komite audit semakin sedikit dalam mengungkapkan *sustainability report* yang tergolong sukarela.

Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report* berdasarkan hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* tetapi Nasir et al. (2014) dengan hasil penelitiannya bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Leverage berpengaruh signifikan berdasarkan hasil penelitian (Nasir et al. 2014) tetapi berbeda dengan hasil penelitian Khafid dan Mulyaningsih (2015) yaitu tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki leverage tinggi maka akan cenderung perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya untuk melaporkan tingkat laba yang tinggi hal ini berdampak pada tidak mengungkapkan *sustainability report* karena membutuhkan biaya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Khafid dan Mulyaningsih, (2015) perbedaannya penelitian ini hanya menggunakan variabel Komite Audit,

Dewan Direksi, dan Leverage. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel lain yaitu Kepemilikan Institusional, karena perusahaan yang terdapat Kepemilikan Institusional akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi dalam hal ini *sustainability report*. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Direksi serta Leverage terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* ?
- b. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* ?
- c. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* ?
- d. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- b. Mengetahui secara empiris pengaruh Komite Audit Pengungkapan *Sustainability Report*.
- c. Mengetahui secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- d. Mengetahui secara empiris pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Pengungkapan *Sustainability Report*

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai informasi Pengungkapan *Sustainability Report* terkait dengan variabel yang digunakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk membuat *Sustainability Report* dalam tujuan untuk transparansi terhadap internal maupun eksternal.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan bagi investor dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membuat regulasi mengenai Pengungkapan *Sustainability Report*.